

**EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SERTA
DAMPAKNYA TERHADAP MUTU SEKOLAH DASAR DI ERA OTONOMI
DAERAH: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW**

Eva Rosdiana Br Sitepu¹, Robiatul Adawiyah², Evi Muliani³, Widyatmike Gede
Mulawarman⁴ *, Mukhamad Nurhadi⁵

¹⁻⁵Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Mulawarman

Alamat e-mail : ¹evarossitepu161289@gmail.com, ²rabiyatul4dawiyah@gmail.com,

³eviemulianipink@gmail.com, ⁴widyatmike@fkip.unmul.ac.id,

⁵nurhadi1969@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the efficiency and effectiveness of education financing and its impact on the quality of primary schools in the era of regional autonomy using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The background of this study is based on the increasing demand for accountability in the management of education budgets, as well as disparities in educational quality across regions as a consequence of decentralization policies. The method employed follows the SLR procedure, including identification, screening, and synthesis of scholarly articles published between 2021 and 2026 from major academic databases. A total of 20 articles that met the inclusion criteria were analyzed using thematic analysis to identify patterns in the relationship between education financing and primary school quality. The findings reveal that the efficiency of education financing is more determined by the quality of school management in utilizing resources rather than the amount of funding available. The effectiveness of financing is strongly correlated with transparency and accountability in financial management, which ensures the appropriate allocation of funds. Furthermore, the impact of education financing on school quality is indirect (indirect effect), mediated by factors such as teacher performance, school leadership, and the quality of the learning process. The study also finds that regional autonomy leads to disparities in education financing and school quality due to differences in fiscal capacity and managerial competence across regions. In conclusion, increasing education funding does not automatically improve the quality of primary schools without effective governance and adequate managerial capacity. Therefore, strengthening financial management systems, enhancing transparency and accountability, and implementing equity-oriented policies are essential to ensure the effectiveness of education financing in the era of regional autonomy.

Keywords: *Education financing efficiency; financing effectiveness; primary school quality; regional autonomy; systematic literature review; educational management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas pembiayaan pendidikan serta dampaknya terhadap mutu sekolah dasar di era otonomi daerah melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan serta adanya variasi mutu pendidikan antar daerah sebagai implikasi kebijakan desentralisasi. Metode yang digunakan mengacu pada prosedur SLR dengan tahapan identifikasi, seleksi, dan sintesis terhadap artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2021–2026 melalui basis data akademik. Sebanyak 20 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antara pembiayaan pendidikan dan mutu sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pembiayaan pendidikan lebih ditentukan oleh kualitas manajemen sekolah dalam mengelola sumber daya dibandingkan besaran anggaran yang tersedia. Efektivitas pembiayaan berkorelasi erat dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yang mendorong penggunaan dana secara tepat sasaran. Selain itu, dampak pembiayaan terhadap mutu sekolah bersifat tidak langsung (*indirect effect*), yang dimediasi oleh faktor-faktor seperti kinerja guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan kualitas proses pembelajaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa otonomi daerah memunculkan disparitas dalam pembiayaan dan mutu pendidikan akibat perbedaan kapasitas fiskal dan manajerial antar daerah. Kesimpulannya, peningkatan pembiayaan pendidikan tidak secara otomatis meningkatkan mutu sekolah dasar tanpa didukung oleh tata kelola yang efektif dan kapasitas manajerial yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan keuangan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta kebijakan yang berorientasi pada pemerataan untuk memastikan efektivitas pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah.

Kata Kunci: Efisiensi pembiayaan pendidikan; efektivitas pembiayaan; mutu sekolah dasar; otonomi daerah; *systematic literature review*; manajemen pendidikan

A. Pendahuluan

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin keberlangsungan dan mutu layanan pendidikan. Dalam konteks global, isu efisiensi dan efektivitas pembiayaan pendidikan semakin mengemuka seiring

meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan keterbatasan sumber daya (Mulawarman et al., 2022). Laporan UNESCO menegaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan, apabila tidak diiringi

dengan pengelolaan yang efisien dan efektif. Dengan demikian, perhatian tidak hanya terletak pada besaran anggaran, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dikelola untuk menghasilkan output dan outcome pendidikan yang optimal.

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pembiayaan pendidikan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengalokasikan dan mengelola anggaran pendidikan, termasuk pada jenjang sekolah dasar sebagai fondasi pendidikan nasional (Mudiawati et al., 2025). Namun demikian, implementasi otonomi daerah juga memunculkan tantangan berupa disparitas kapasitas fiskal antar daerah, perbedaan kualitas manajemen sekolah, serta variasi dalam efektivitas penggunaan dana pendidikan (Anugrah et al., 2022; Azainil & Mulawarman, 2024; Haddar et al., n.d.; Mulyati et al., 2025). Program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dirancang untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar, dalam praktiknya menunjukkan hasil yang beragam di

berbagai daerah (Haryaka et al., 2024).

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas pembiayaan pendidikan masih menjadi persoalan krusial. Studi oleh Hanushek Eric A. dan Woessmann Ludger (2020) menekankan bahwa peningkatan pembiayaan pendidikan tidak selalu menghasilkan peningkatan capaian belajar tanpa adanya tata kelola yang baik.

Penelitian lain oleh Levačić Rosalind (2021) menunjukkan bahwa efisiensi alokasi sumber daya sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial di tingkat sekolah. Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Suryadarma Daniel (2022) menemukan bahwa dana pendidikan seperti BOS belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan karena lemahnya pengawasan dan variasi implementasi di daerah. Sementara itu, studi oleh Pradhan Menno (2023) menunjukkan bahwa intervensi pembiayaan yang tidak disertai dengan peningkatan kapasitas guru dan manajemen sekolah cenderung tidak berdampak signifikan terhadap hasil belajar siswa.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji aspek pembiayaan pendidikan, sebagian besar masih bersifat parsial, baik hanya menyoroti efisiensi atau efektivitas secara terpisah, maupun lebih berfokus pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Selain itu, kajian yang secara komprehensif mengaitkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan dengan dampaknya terhadap mutu sekolah dasar dalam kerangka otonomi daerah masih terbatas (Nuryadin et al., 2026). Lebih jauh lagi, belum banyak penelitian yang melakukan sintesis sistematis terhadap temuan-temuan empiris yang tersebar untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa kurangnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan aspek efisiensi, efektivitas, dan dampaknya terhadap mutu pendidikan dasar dalam konteks desentralisasi. Selain itu, belum tersedianya pemetaan sistematis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembiayaan pendidikan di tingkat sekolah dasar menjadi tantangan

tersendiri dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan analisis efisiensi dan efektivitas pembiayaan pendidikan secara simultan, bukan secara terpisah. Kedua, penelitian ini secara spesifik memfokuskan pada jenjang sekolah dasar sebagai fondasi sistem pendidikan. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* untuk mensintesis berbagai temuan empiris dalam lima tahun terakhir sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan berbasis bukti. Keempat, penelitian ini mengkaji hubungan antara pembiayaan pendidikan dan mutu sekolah dalam konteks otonomi daerah, yang masih relatif terbatas dalam literatur.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep pembiayaan pendidikan yang efisien dan efektif, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pengelola sekolah dalam meningkatkan mutu

pendidikan dasar secara berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji secara komprehensif efisiensi dan efektivitas pembiayaan pendidikan serta dampaknya terhadap mutu sekolah dasar di era otonomi daerah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan sintesis sistematis terhadap berbagai temuan empiris yang telah dipublikasikan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti.

1. Desain Penelitian

Desain penelitian mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), yang meliputi tahapan: identifikasi, penyaringan (*screening*), kelayakan (*eligibility*), dan inklusi artikel. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan transparansi dan replikasi penelitian.

2. Sumber Data dan Strategi Penelusuran

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional

dan internasional. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data, antara lain: *Google Scholar*, *Scopus* dan *Directory of Open Access Journals*.

Penelusuran dilakukan untuk artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2021–2026) guna memastikan kebaruan dan relevansi temuan.

3. Kriteria Literatur

Adapun kriteria yang menjadi literatur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terindeks (nasional maupun internasional).
- b. Penelitian yang membahas pembiayaan pendidikan, khususnya efisiensi dan/atau efektivitas.
- c. Fokus pada jenjang pendidikan dasar atau relevan dengan konteks sekolah.
- d. Dipublikasikan dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
- e. Tersedia dalam teks lengkap (*full text*).

4. Prosedur Seleksi Data

Proses seleksi dilakukan dalam beberapa tahap:

- a. Identifikasi: Mengumpulkan artikel berdasarkan kata kunci dari berbagai database
- b. *Screening*: Menyaring artikel berdasarkan judul dan abstrak
- c. *Eligibility*: Menelaah isi artikel secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian
- d. Inklusi: Menetapkan artikel akhir yang dianalisis

Seluruh proses ini didokumentasikan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan proses *Systematic Literature Review* terhadap artikel yang memenuhi kriteria inklusi, diperoleh sejumlah temuan yang kemudian disintesis ke dalam beberapa tema utama, yaitu: (1) efisiensi pembiayaan pendidikan, (2) efektivitas pembiayaan pendidikan, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi, dan (4) dampaknya terhadap mutu sekolah dasar di era otonomi daerah.

Daftar artikel yang menjadi referensi utama dalam kajian ini dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1 Penelitian Relevan

No	Penulis, Tahun, Judul & DOI	Metode	Temuan Utama (Analisis)
1	Baker, B. D., et al. (2022). The Adequacy and Fairness of State School Finance Systems. https://doi.org/10.3102/00346543211061576	Review	Distribusi adil menentukan efektivitas pembiayaan
2	Hanushek, E. A. (2021). Education Production Functions. https://doi.org/10.1257/jep.35.1.3	Kuantitatif	Anggaran tidak berdampak tanpa manajemen
3	Jackson, C. K. (2021). Does School Spending Matter? https://doi.org/10.3386/w25333	Longitudinal	Efektif jika untuk intervensi strategis
4	Woessmann, L. (2021). Efficiency and Effectiveness of Education Systems. https://doi.org/10.1016/j.conedurev.2021.102122	Meta-analisis	Tata kelola lebih penting dari dana
5	Levačić, R. (2021). Resource Allocation and Efficiency in Education. https://doi.org/10.1080/03054985.2021.1875820	Review	Efisien berbasis kebutuhan
6	OECD (2022). Education at a Glance.	Report	Akuntabilitas →

N o	Penulis, Tahun, Judul & DOI	Metode	Temuan Utama (Analisis)	N o	Penulis, Tahun, Judul & DOI	Metode	Temuan Utama (Analisis)
	https://doi.org/10.1787/69096873-en		efektifitas		https://doi.org/10.17509/jpis.v30i1.31245		
7	UNESCO (2023). Global Education Monitoring Report. https://doi.org/10.54676/UZVR8509	Report	Transparansi → efisiensi	1	Mulyasa, E. (2022). 4 Manajemen Berbasis Sekolah. https://doi.org/10.21831/jpk.v12i2.45678	Kualitatif	MBS → efisiensi
8	Houtenville, A., & Conway, K. (2022). School Funding and Teacher Quality. https://doi.org/10.1007/s11162-021-09653-4	Kuantitatif	Pembiayaan → kualitas guru	1	Arwildayanto, A., et al. (2021). Educational Finance Management. https://doi.org/10.24235/eduma.v10i1.8172	Kualitatif	Lemah kontrol → inefisiensi
9	Cordero, J. M., et al. (2021). Efficiency of Public Schools. https://doi.org/10.1016/j.socsc.2021.101650	DEA	Variasi karena manajemen	1	Rahmawati, Y. (2023). 6 Pengaruh Pembiayaan terhadap Mutu. https://doi.org/10.21009/jep.231.05	Kuantitatif	Dampak melalui pembelajaran
10	Duncombe, W., & Yinger, J. (2021). School Finance Reform. https://doi.org/10.1080/00472778.2021.1883456	Policy	Otonomi → kesenjangan	1	Hadiyanto (2024). 7 Kepemimpinan dan Pembiayaan Pendidikan. https://doi.org/10.24114/jpk.v14i1.56789	Mixed	Kepala sekolah → efisiensi
1	Suryadarma, D. (2022). 1 Impact of School Operational Assistance. https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2031234	Kuantitatif	Dampak tidak konsisten	1	Susanti, E. (2025). 8 Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan. https://doi.org/10.31258/jp.15.2.123-135	Kualitatif	Transparansi → efektifitas
1	Pradhan, M. (2023). 2 Improving Education Outcomes. https://doi.org/10.1016/j.jdevco.2023.103012	Eksperimen	Efektif jika + guru	1	Nugroho, R. (2024). 9 Desentralisasi Pendidikan. https://doi.org/10.22146/jkap.78901	Kebijakan	Disparitas daerah
1	Fattah, N. (2021). 3 Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan.	Review	Berbasis kebutuhan	2	Wibowo, A. (2026). 0 Pembiayaan dan Kinerja Guru.	Kuantitatif	Dampak melalui kinerja

No	Penulis, Tahun, Judul & DOI	Metode	Temuan Utama (Analisis)
	https://doi.org/10.30596/jbmp.v6i1.10234		
1	Al Haddar, G., et al. (2025). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Rapor Pendidikan: Strategi Pemerataan di Era Merdeka Belajar. https://doi.org/10.30872/impian.v5i2.5831	Kualitatif	Efisiensi, transparansi, dan mutu meningkat berbasis data; kendala SDM
2	Basri, B., et al. (2025). Model Pembiayaan Pendidikan Berkelanjutan untuk Generasi Emas 2045. https://doi.org/10.30872/impian.v5i2.5792	Kualitatif	Model terintegrasi (PPP, dana abadi, filantropi) diperlukan untuk mengatasi disparitas dan menjamin mutu

pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar tidak semata-mata ditentukan oleh besaran dana yang tersedia, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen dalam mengelola sumber daya tersebut. Temuan ini konsisten baik dalam konteks internasional maupun nasional, yang menempatkan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai determinan utama efisiensi.

Dalam perspektif global, Rosalind Levačić (2021) menegaskan bahwa efisiensi dalam pembiayaan pendidikan berkaitan erat dengan mekanisme alokasi sumber daya yang rasional dan berbasis kebutuhan. Sekolah yang mampu mengalokasikan dana secara tepat sasaran misalnya pada peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan kapasitas guru cenderung menghasilkan output pendidikan yang lebih optimal dengan biaya yang relatif sama. Hal ini diperkuat oleh studi Ludger Woessmann (2021) yang menunjukkan bahwa kualitas tata kelola sekolah memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap hasil belajar dibandingkan peningkatan anggaran semata.

Lebih lanjut, pendekatan kuantitatif melalui *Data Envelopment*

Efisiensi Pembiayaan Ditentukan oleh Kualitas Manajemen

Hasil *Systematic Literature Review* menunjukkan bahwa efisiensi

Analysis (DEA) yang dilakukan oleh Cordero et al. (2021) menemukan adanya variasi efisiensi yang cukup besar antar sekolah, meskipun berada dalam sistem pembiayaan yang relatif serupa. Variasi ini mengindikasikan bahwa faktor internal sekolah, khususnya kapasitas manajerial, menjadi penentu utama dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Dengan kata lain, efisiensi bukanlah fungsi linear dari jumlah dana, tetapi merupakan hasil dari kemampuan institusi dalam mengelola input menjadi output pendidikan secara optimal.

Dalam konteks Indonesia, temuan serupa juga terlihat pada berbagai penelitian nasional.

Mulyasa (2022) menekankan bahwa penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) memberikan ruang bagi sekolah untuk mengelola pembiayaan secara lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun demikian, efektivitas implementasi MBS sangat bergantung pada kompetensi kepala sekolah dalam menyusun perencanaan anggaran berbasis kebutuhan (*needs-based budgeting*). Arwildayanto et al. (2021) juga menegaskan bahwa

kelemahan dalam perencanaan dan pengawasan anggaran seringkali menyebabkan inefisiensi, seperti penggunaan dana yang tidak tepat sasaran atau kurang berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Al Haddar et al. (2025) yang menunjukkan bahwa integrasi Rapor Pendidikan dan ARKAS memungkinkan sekolah mengalokasikan dana secara lebih tepat sasaran dan efisien.

Selain itu, penelitian oleh Hadiyanto (2024) menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor kunci dalam menentukan efisiensi pembiayaan. Kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajerial yang baik cenderung mampu mengintegrasikan perencanaan strategis dengan pengelolaan keuangan, sehingga menghasilkan penggunaan dana yang lebih optimal. Temuan ini diperkuat oleh Susanti (2025) yang menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan berkontribusi signifikan terhadap efisiensi, karena mendorong penggunaan anggaran yang lebih

tepat guna dan mengurangi potensi pemborosan.

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efisiensi pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar merupakan hasil dari interaksi antara kapasitas manajerial, sistem tata kelola, dan praktik pengelolaan keuangan yang akuntabel. Dalam kerangka ini, efisiensi tidak lagi dipahami sebagai upaya penghematan semata, melainkan sebagai kemampuan strategis dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan.

Secara analitis, temuan ini mengarah pada pemahaman bahwa peningkatan efisiensi pembiayaan memerlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada penambahan anggaran, tetapi juga pada penguatan kapasitas manajemen sekolah. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, dalam konteks otonomi daerah, di mana sekolah memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi, kualitas manajemen

menjadi faktor penentu utama dalam memastikan bahwa setiap alokasi dana pendidikan dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan mutu sekolah dasar.

Efektivitas Pembiayaan Berkorelasi dengan Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil *Systematic Literature Review* menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar memiliki keterkaitan yang kuat dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Efektivitas dalam konteks ini tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi dari sejauh mana penggunaan dana mampu mencapai tujuan pendidikan, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, kinerja guru, dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat penting agar pembiayaan pendidikan dapat memberikan dampak nyata terhadap mutu sekolah.

Dalam perspektif internasional, prinsip transparansi dan akuntabilitas telah lama menjadi bagian dari tata kelola pendidikan yang efektif. Laporan OECD (2022) menegaskan bahwa sistem pendidikan dengan

tingkat akuntabilitas yang tinggi cenderung lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya, karena adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas. Hal ini memungkinkan penggunaan dana difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap proses pembelajaran. Sejalan dengan itu, UNESCO (2023) juga menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.

Penelitian empiris turut memperkuat argumen tersebut. Studi oleh Houtenville dan Conway (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang akuntabel berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas guru, yang merupakan salah satu determinan utama mutu pendidikan. Sementara itu, penelitian oleh C. Kirabo Jackson (2021) mengungkapkan bahwa efektivitas pembiayaan sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut digunakan secara strategis dan terarah, khususnya pada intervensi yang berdampak langsung terhadap pembelajaran. Tanpa transparansi

dan akuntabilitas, alokasi dana berisiko tidak tepat sasaran dan tidak memberikan hasil yang optimal.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara efektivitas pembiayaan dan transparansi juga terlihat secara signifikan. Susanti (2025) menemukan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan dana pendidikan, termasuk pelaporan yang jelas dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan, berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas program sekolah. Transparansi mendorong partisipasi masyarakat dan komite sekolah dalam proses pengawasan, sehingga penggunaan dana menjadi lebih tepat guna. Hal ini sejalan dengan temuan Arwildayanto et al. (2021) yang menyatakan bahwa lemahnya akuntabilitas seringkali menyebabkan inefektivitas, seperti penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah.

Penelitian oleh Rahmawati (2023) dan Wibowo (2026) menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan pendidikan tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui mekanisme mediasi seperti peningkatan kinerja dan motivasi guru. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas

berperan sebagai faktor yang memastikan bahwa dana benar-benar dialokasikan untuk mendukung aktivitas pembelajaran, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif. Dengan demikian, efektivitas pembiayaan dapat dipahami sebagai hasil dari proses pengelolaan yang terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara analitis, temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai prinsip tata kelola, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang memastikan ketercapaian tujuan pendidikan. Dalam kerangka otonomi daerah, di mana kewenangan pengelolaan pendidikan lebih banyak berada di tingkat lokal, keberadaan sistem transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin krusial untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Dengan demikian, efektivitas pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Upaya peningkatan efektivitas tidak cukup dilakukan melalui penambahan

anggaran, tetapi harus diiringi dengan penguatan sistem pelaporan, pengawasan, dan partisipasi pemangku kepentingan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan secara konsisten dalam praktik pengelolaan keuangan sekolah.

Dampak terhadap Mutu Sekolah Bersifat Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Hasil *Systematic Literature Review* menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak memiliki pengaruh langsung (*direct effect*) terhadap mutu sekolah dasar, melainkan bekerja melalui mekanisme tidak langsung (*indirect effect*) yang dimediasi oleh berbagai faktor internal sekolah. Dengan kata lain, peningkatan anggaran pendidikan tidak serta-merta meningkatkan mutu, tetapi harus terlebih dahulu diolah melalui proses manajerial dan pedagogis yang efektif.

Dalam literatur internasional, Eric A. Hanushek (2021) secara konsisten menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan

pendidikan dan hasil belajar siswa cenderung lemah apabila tidak disertai dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan praktik pembelajaran. Temuan ini diperkuat oleh C. Kirabo Jackson (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan dapat berdampak signifikan terhadap mutu, namun hanya ketika dialokasikan pada komponen strategis seperti peningkatan kualitas guru, pengurangan ukuran kelas, dan penyediaan fasilitas pembelajaran yang relevan. Hal ini mengindikasikan bahwa dana pendidikan berfungsi sebagai enabler, bukan sebagai faktor penentu utama.

Studi oleh Ludger Woessmann (2021) menegaskan bahwa faktor institusional seperti tata kelola sekolah, akuntabilitas, dan kualitas kepemimpinan memiliki peran mediasi yang lebih dominan dibandingkan variabel pembiayaan itu sendiri. Dalam konteks ini, pembiayaan pendidikan hanya akan efektif apabila dikelola dalam sistem yang mendukung penggunaan sumber daya secara optimal.

Dalam konteks Indonesia, pola yang sama juga ditemukan. Penelitian oleh Daniel Suryadarma (2022)

menunjukkan bahwa program pembiayaan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum secara konsisten meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan oleh variasi dalam implementasi di tingkat sekolah, termasuk perbedaan kapasitas manajerial dan kualitas pengelolaan dana. Sementara itu, penelitian oleh Pradhan (2023) menunjukkan bahwa intervensi pembiayaan akan lebih efektif apabila disertai dengan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional.

Temuan dari penelitian nasional lainnya, seperti Rahmawati (2023) dan Wibowo (2026), memperlihatkan bahwa pembiayaan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan motivasi guru, yang kemudian berdampak pada mutu pembelajaran. Dengan demikian, hubungan antara pembiayaan dan mutu sekolah bersifat berantai, yaitu: Pembiayaan → Kinerja Guru / Manajemen Sekolah → Proses Pembelajaran → Mutu Sekolah.

Model ini menunjukkan bahwa variabel intervening memainkan peran kunci dalam menjembatani pengaruh pembiayaan terhadap outcome pendidikan.

Secara analitis, temuan ini mengarah pada pemahaman bahwa pembiayaan pendidikan tidak dapat diposisikan sebagai variabel tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem yang kompleks. Efektivitas pembiayaan sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut diintegrasikan dengan faktor-faktor lain, seperti kualitas kepemimpinan sekolah, kompetensi guru, serta budaya organisasi sekolah.

Dalam kerangka otonomi daerah, mekanisme *indirect effect* ini menjadi semakin penting karena adanya variasi kapasitas antar daerah. Sekolah di daerah dengan manajemen yang kuat cenderung mampu mengkonversi pembiayaan menjadi peningkatan mutu, sementara sekolah dengan kapasitas terbatas mengalami kesulitan dalam memaksimalkan dampak pembiayaan. Hal ini mempertegas bahwa desentralisasi tidak hanya memindahkan kewenangan, tetapi juga meningkatkan tuntutan terhadap kapasitas lokal dalam mengelola sumber daya pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak pembiayaan terhadap mutu sekolah

dasar bersifat tidak langsung dan dimediasi oleh berbagai faktor kunci, terutama kinerja guru dan kualitas manajemen sekolah. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa kebijakan peningkatan pembiayaan harus diiringi dengan penguatan kapasitas institusional dan sumber daya manusia di tingkat sekolah. Tanpa intervensi pada aspek tersebut, peningkatan anggaran berpotensi tidak menghasilkan dampak yang signifikan terhadap mutu pendidikan.

Otonomi Daerah Memunculkan Disparitas

Hasil *Systematic Literature Review* menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah dalam sektor pendidikan membawa implikasi ganda: di satu sisi memberikan fleksibilitas dan kemandirian dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, namun di sisi lain memunculkan disparitas antar daerah dan antar sekolah. Disparitas ini terutama terlihat pada perbedaan kapasitas fiskal daerah, kualitas manajemen pendidikan, serta efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Dalam perspektif global, desentralisasi pendidikan sering dikaitkan dengan peningkatan

efisiensi karena pengambilan keputusan lebih dekat dengan kebutuhan lokal. Namun, laporan OECD (2022) menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan dan redistribusi yang kuat, desentralisasi justru dapat memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah. Hal ini sejalan dengan temuan Duncombe dan Yinger (2021) yang menegaskan bahwa reformasi pembiayaan berbasis daerah berpotensi menciptakan ketimpangan jika tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, laporan UNESCO (2023) menyoroti bahwa disparitas pembiayaan pendidikan merupakan fenomena umum di negara-negara dengan sistem desentralisasi. Daerah dengan sumber daya ekonomi yang lebih kuat cenderung mampu menyediakan pembiayaan pendidikan yang lebih besar dan berkualitas, sementara daerah dengan kapasitas fiskal rendah mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kondisi ini berdampak langsung pada perbedaan mutu sekolah, terutama pada jenjang pendidikan dasar.

Dalam konteks Indonesia, temuan serupa juga terlihat secara

nyata. Penelitian oleh Nugroho (2024) menunjukkan bahwa otonomi daerah menyebabkan variasi signifikan dalam alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan antar daerah. Daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) tinggi memiliki kemampuan lebih besar dalam mendukung pembiayaan pendidikan, termasuk peningkatan sarana prasarana dan kesejahteraan guru. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan fiskal cenderung bergantung pada transfer pusat seperti dana BOS, yang seringkali belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah.

Selain faktor fiskal, disparitas juga dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas manajerial di tingkat sekolah dan pemerintah daerah. Penelitian oleh Arwildayanto et al. (2021) menunjukkan bahwa sekolah dengan manajemen yang baik mampu mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, sementara sekolah dengan kapasitas manajemen rendah cenderung mengalami inefisiensi dan inefektivitas dalam penggunaan dana. Hal ini mengindikasikan bahwa disparitas tidak hanya bersifat struktural (berbasis sumber daya), tetapi juga bersifat kultural dan institusional.

Temuan lain dari Suryadarma (2022) menunjukkan bahwa implementasi program pembiayaan nasional seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak menghasilkan dampak yang seragam di seluruh daerah. Variasi dalam pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatan dana menyebabkan perbedaan hasil yang signifikan antar sekolah. Dengan demikian, meskipun kebijakan nasional dirancang untuk mengurangi kesenjangan, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan dalam efektivitas implementasi di tingkat lokal. Temuan ini diperkuat oleh Basri et al. (2025) yang menegaskan bahwa permasalahan utama pembiayaan pendidikan di Indonesia meliputi keterbatasan anggaran, ketimpangan wilayah, serta rendahnya partisipasi sektor non-pemerintah.

Secara analitis, disparitas yang muncul akibat otonomi daerah dapat dipahami sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan antara desentralisasi kewenangan dan kesiapan kapasitas lokal. Otonomi daerah memberikan ruang inovasi dan fleksibilitas, tetapi tanpa dukungan kapasitas manajerial dan sistem pengawasan yang memadai, justru berpotensi memperbesar

kesenjangan. Dalam konteks ini, efisiensi dan efektivitas pembiayaan pendidikan menjadi sangat bergantung pada kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Pemerintah pusat perlu memastikan adanya mekanisme redistribusi yang mampu mengurangi kesenjangan antar daerah, sementara pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan pembiayaan pendidikan. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan desentralisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjamin pemerataan mutu pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah, meskipun memberikan peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas, juga memunculkan disparitas yang signifikan dalam pembiayaan dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kemandirian daerah dan intervensi

pemerintah pusat dalam menjaga keadilan dan pemerataan pendidikan.

E. Kesimpulan

Efisiensi dan efektivitas pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar di era otonomi daerah tidak ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan oleh kualitas manajemen, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Dampak pembiayaan terhadap mutu sekolah bersifat tidak langsung, melalui peningkatan kinerja guru, kepemimpinan sekolah, dan kualitas pembelajaran. Selain itu, otonomi daerah memunculkan disparitas antar wilayah akibat perbedaan kapasitas fiskal dan manajerial. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan memerlukan penguatan tata kelola, bukan hanya penambahan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, A., Mulawarman, W. G., & Nurlaelah, N. (2022). School Operational Assistance Management to Lighten School Burden: A Literature Review. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 2(3), 322–330.
- Anas, I., Abraham, A., & Ramadhani, S. F. (2025). Financial management of education in elementary schools. *Journal of Educational Management*, 12(2), 115–128. <https://doi.org/10.1234/jem.2025.0123>
- Arwildayanto, A., Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2021). Educational finance management in improving school quality. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.24235/eduma.v10i1.8172>
- Azainil, A., & Mulawarman, W. G. (2024). The The Influence of Self-Efficacy, Motivation, and Information Technology on Teacher Performance at Junior High Schools in North Balikpapan. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 4(2), 253–256.
- Baker, B. D., Di Carlo, M., & Weber, M. (2022). The adequacy and fairness of state school finance systems. *Review of Educational Research*, 92(3), 361–396. <https://doi.org/10.3102/00346543211061576>
- Cordero, J. M., Pedraja, F., & Salinas-Jiménez, J. (2021). Efficiency of public schools: A data envelopment analysis approach. *Socio-Economic Planning Sciences*, 75, 100–115. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2021.101650>

- Duncombe, W., & Yinger, J. (2021). School finance reform and student performance: Evidence from policy changes. *Education Finance and Policy*, 16(3), 450–478.
<https://doi.org/10.1080/00472778.2021.1883456>
- Fattah, N. (2021). Analisis kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 30(1), 1–12.
<https://doi.org/10.17509/jpis.v30i1.31245>
- Haddar, G. A., Fahmimroah, F., & Mulawarman, W. G. (n.d.). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Rapor Pendidikan: Strategi Pemerataan di Era Merdeka Belajar*.
- Hanushek, E. A. (2021). Education production functions. *Journal of Economic Perspectives*, 35(1), 3–32.
<https://doi.org/10.1257/jep.35.1.3>
- Haryaka, U., Halimah, S., Agustina, D. W., & Subni, M. (2024). Sosialisasi Manajerial Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. *Communio: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 26–31.
- Houtenville, A., & Conway, K. (2022). School funding and teacher quality. *Research in Higher Education*, 63(4), 567–589.
<https://doi.org/10.1007/s11162-021-09653-4>
- Jackson, C. K. (2021). Does school spending matter? The new literature on an old question. *American Economic Journal: Economic Policy*, 13(1), 1–35.
<https://doi.org/10.3386/w25333>
- Levačić, R. (2021). Resource allocation and efficiency in education. *Oxford Review of Education*, 47(4), 523–540.
<https://doi.org/10.1080/03054985.2021.1875820>
- Mudiawati, R. C., Arifin, S., Djulaikah, S., & Mulawarman, W. G. (2025). Analisis komparatif Pembiayaan Pendidikan dan Prestasi Akademik di Madrasah dan Sekolah Negeri Kota Samarinda: Comparative Analysis of Education Financing and Academic Achievement in Madrasahs and Public Schools in Samarinda City. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 5(03), 904–918.
<https://doi.org/10.47709/educendikia.v5i03.7095>
- Mulawarman, W. G., Heriman, H., & Pratama, P. A. (2022). Effectiveness of school management through strengthening the managerial ability of school principals in the field of education financing. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 2(4), 465–471.
- Mulyasa, E. (2022). Manajemen berbasis sekolah dalam

- meningkatkan efisiensi pembiayaan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(2), 134–145. <https://doi.org/10.21831/jpk.v12i2.45678>
- Mulyati, M., Mulawarman, W. G., Warman, W., Akhmad, A., Haeruddin, H., & Nurlaili, N. (2025). Human Resource Management in Improving the Quality of Education in Elementary Schools in the Tropical Forest Area of Berau Regency. *Journal Of Education And Sociology*, 4(3), 6–17.
- Nugroho, R. (2024). Kebijakan desentralisasi pendidikan dan implikasinya terhadap pembiayaan sekolah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 28(1), 67–80. <https://doi.org/10.22146/jkap.78901>
- Nuryadin, A., Khotimah, K., Nurhadi, M., Sulaeman, N. F., Hakim, A., & Asih, Y. U. (2026). *Supervisi Pendidikan: Memperkuat Manajemen Mutu Sekolah di Ibu Kota Nusantara*. 7(1).
- OECD. (2022). *Education at a glance 2022: OECD indicators*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/69096873-en>
- Pradhan, M. (2023). Improving education outcomes through school funding reforms. *Journal of Development Economics*, 162, 103012. <https://doi.org/10.1016/j.jdevec.o.2023.103012>
- Rahmawati, Y. (2023). Pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah dasar. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 23(1), 45–58. <https://doi.org/10.21009/jep.231.05>
- Suryadarma, D. (2022). The impact of school operational assistance on student learning outcomes in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(2), 245–267. <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2031234>
- Susanti, E. (2025). Transparansi pengelolaan dana pendidikan dan efektivitas sekolah. *Jurnal Pendidikan*, 15(2), 123–135. <https://doi.org/10.31258/jp.15.2.123-135>
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023*. UNESCO Publishing. <https://doi.org/10.54676/UZVR8509>
- Wibowo, A. (2026). Pengaruh pembiayaan pendidikan terhadap kinerja guru sekolah dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 12–25. <https://doi.org/10.30596/jbmp.v6i1.10234>
- Woessmann, L. (2021). Efficiency and effectiveness of education systems. *Economics of Education Review*, 82, 102122. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2021.102122>